

## ABSTRAK

Jan Bosarmen Sinaga (01659200015)

### **KEDUDUKAN BARANG MILIK DAERAH YANG DIKELOLA PIHAK KETIGA MENURUT HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA**

(+ 86 halaman; 5 lampiran)

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk meneliti kedudukan aset daerah berdasarkan hukum perjanjian di Indonesia. Aset daerah yang pada hakikatnya merupakan tanah negara diberikan hak pengelolaan kepada pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terbatas, membuat pemerintah daerah terbatas dalam mengelola aset daerah untuk itu diperlukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola aset daerah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk melihat kedudukan dan skema perjanjian aset daerah dengan pihak ketiga berdasarkan Hukum Perjanjian di Indonesia agar sesuai dengan Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan hukum. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Dari penelitian yang dilakukan akan diketahui pengaturan mengenai aset daerah, kedudukan aset daerah, dan skema perjanjian pemerintah daerah dengan pihak ketiga terhadap aset daerah berdasarkan Hukum Perjanjian. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bentuk-bentuk kerja sama pemerintah daerah dengan pihak lain. Penelitian ini menguraikan konsep BOT (*Built Operate Transfer*) sebagai skema perjanjian yang digunakan pemerintah daerah di Indonesia. Skema BOT mendatangkan keuntungan yang cukup besar bagi pendapatan daerah, akan tetapi juga sering mengalami permasalahan ingkar janji antara para pihak. Walaupun demikian skema BOT tetap layak untuk digunakan mengingat pembebanan biaya kepada pemerintah daerah tidak besar dan akan mendatangkan keuntungan bagi semua pihak.

Referensi 20 (1978-2020)

Kata Kunci: aset daerah, Hukum Perjanjian, *Built Operate Transfer*.

## ABSTRACT

Jan Bosarmen Sinaga (01659200015)

### **THE LEGAL STANDING OF REGIONAL ASSET MANAGED BY THIRD PARTIES ACCORDING TO THE CONTRACT LAW IN INDONESIA**

(+ 86 pages ; 5 attachments)

This thesis research aims to examine the position of regional assets based on treaty law in Indonesia. Regional assets that are essentially state land are granted management rights to local governments. The Regional Revenue and Spending Budget is limited, making the local government limited in managing regional assets for it requires cooperation with third parties to manage regional assets in Indonesia. This research was conducted to look at the position and scheme of regional asset agreements with third parties under the Contract Law in Indonesia in order to achieve justice, certainty, and expediency. The research showed the arrangements regarding regional assets, the position of regional assets, and the scheme of local government agreements with third parties to local assets under the Contract Law. Regulation of Indonesian Minister of Home Affairs Number 19 of 2016 mentioned various forms of cooperation between local government with other parties. This research described the concept of Built Operate Transfer (BOT) as an agreement scheme used by local governments. BOT schemes bring considerable benefits to regional revenues, but also often experience problems breaking promises between the parties. However, the BOT scheme is still worth considering that the burden of costs to local governments is not large and will bring benefits to all parties.

Reference: 20 (1978-2020)

Key Words: regional asset, Contract Law, *Built Operate Transfer*.